

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN MELALUI ANGGARAN DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAGIMANA)

Nazwa Aulia M. Uloli¹, Yacob Noho Nani², Romy Tantu³

Universitas Negeri Gorontalo, nazwaauliauloli123@gmail.com¹

Universitas Negeri Gorontalo, yacobnani@ung.ac.id²

Universitas Negeri Gorontalo, romytantu@ung.ac.id³

Dikirim (Juli 24, 2024)

Direvisi (Agustus 15, 2024)

Diterima (Agustus 16, 2024)

Diterbitkan (Agustus 31, 2024)

Corresponding Author

Nazwa Aulia M. Uloli

nazwaauliauloli123@gmail.com

ABSTRAK

Kebutuhan yang paling penting untuk manusia ialah pangan, dan setiap orang memiliki hak memenuhi dan mempunyai akses kebutuhan untuk pangannya. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan melalui anggaran dana (studi kasus di Kecamatan Pagimana) telah diimplementasikan sesuai dengan teori dari George C. Edward III dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik tetapi ketersediaan anggaran dalam implementasi ketahanan pangan masih minim walaupun di setiap tahun di kecamatan pagimana anggaran sudah tersedia namun pemerintah masih kesulitan dalam pengadaan bantuan pangan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Anggaran Dana Desa; Implementasi; Program; Ketahanan Pangan

ABSTRACT

The most urgent need for humans is food, and everyone has the right to fulfill and have access to their food needs. The approach used is qualitative with descriptive research type. Data collection uses interviews, observation, and documentation. Data analysis uses the Miles & Huberman model. The results show that implementing the food security program through Edward III's theory has gone well. However, the availability of budget for implementing food security is still minimal even though every year in the Pagimana sub-district the budget is available, the government still has difficulty in providing food aid to the community.

Key Word: Food Security; Implementation; Program; Village Fund Allocation.

PENDAHULUAN

Kebutuhan yang paling penting untuk manusia ialah pangan, dan setiap orang memiliki hak memenuhi dan mempunyai akses kebutuhan untuk pangannya (Kusuma Wardhana et al., 2022). Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, perlu dilakukan beberapa usaha, mewujudkan ketahanan pangan adalah salah satu upaya yang harus dilakukan. Ketahanan pangan sebagai permasalahan global dan permasalahan yang sangat rumit karena meliputi aspek ekonomi, sosial lingkungan dan politik. Aspek politik menjadi salah satu aspek yang menjadi faktor penting proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pangan. Mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan ialah bagian penting dari pertemuan yang diadakan oleh berbagai negara dan organisasi internasional.(Fazry, 2019)

Pencapaian ketahanan pangan yang baik menjadikan ekonomi dan politik yang stabil serta menjadi jaminan pemerintah untuk ketersediaan pangan murah yang dapat menjadi komitmen nasional berpartisipasi merealisasikan tujuan pembangunan global dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat hal ini pemerintah harus mengupayakan tercapainya kemandirian pangan salah satunya yaitu tersedianya pangan untuk masyarakat dalam waktu yang panjang oleh karena itu pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat agar terciptanya ketahanan pangan yang baik dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.(Yulianti et al., 2023)

Kegiatan ketahanan pangan nasional berfokus pada pedesaan, yang merupakan wilayah terkecil. Pembangunan di pedesaan bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan ketika wilayah memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi untuk memastikan pasokan, distribusi, dan makanan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya ketahanan pangan desa yaitu ketersediaan pangan di desa menggunakan Anggaran Dana Desa yang sudah diatur dalam keputusan menteri desa dalam Kepmendesa (2022). Untuk mewujudkan hal yang diinginkan, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana untuk desa yang sangat besar. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2022 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana desa sebesar Rp. 68.740.872.414.21 untuk seluruh desa yang ada di Indonesia yang berjumlah 75.265 desa.(Kemendesa, 2022)

Kecamatan Pagimana adalah salah satu kecamatan yang menerapkan program ketahanan pangan yang setiap tahunnya mempunyai Anggaran Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan dimana melalui Anggaran Dana Desa seharusnya mampu melakukan program ketahanan pangan secara substansial. Anggaran program ketahanan pangan desa Kecamatan Pagimana stabil dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Dimana Anggaran ini didapatkan dari Anggaran dana desa yang ditetapkan untuk ketahanan pangan paling sedikit 20%. Pemerintah Kabupaten banggai mempunyai Program Satu Juta Satu Pekarangan, program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan, terutama di daerah pedesaan. Implementasi program seperti penyerahan bantuan ternak untuk ketahanan pangan sudah direalisasikan. Berikut data penerima program bantuan satu juta satu pekarangan.

Tabel 1.1

Penerima Bantuan Program Satu Juta Satu Pekarangan Kecamatan Pagimana Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Nama Kelompok	Alamat		Jumlah	Jenis Bantuan
			Desa	Kecamatan		
1.	2021	-	-	-	-	-
		Potoutusan	Bondat	Kec. Pagimana	10	Ayam Petelur
		Silat	Poh	Kec. Pagimana	10	Ayam Petelur
		Ingin Maju	Lambangangan	Kec. Pagimana	10	Ayam Petelur
		Ina-Inau	Tombang	Kec. Pagimana	10	Ayam Petelur
2.	2022	Mau Maju	Pinapuan	Kec. Pagimana	10	Ayam Petelur
		Titian Hidup	Huhak	Kec. Pagimana	10	Ayam Petelur
		Mekar Jaya	Tintingang	Kec. Pagimana	10	Ayam Petelur
		Sejahtera Maju	Pisou	Kec. Pagimana	10	Ayam Petelur
		Nompolee	Tongkonunuk	Kec. Pagimana	10	Ayam Petelur
3.	2023	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Banggai (2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa bantuan ternak untuk ketahanan pangan belum optimal. Di tahun 2021 dan 2023 di Kecamatan Pagimana tidak menerima bantuan apapun sedangkan di tahun 2022 ada 9 dari 33 desa menerima bantuan ternak. Adapun permasalahan lain yaitu Penerima bantuan program satu juta satu pekarangan belum bisa dirasakan semua desa yang ada di kecamatan pagimana dan juga penerimaan bantuan ini belum bisa diberikan setiap tahun dan Ketahanan pangan belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Malawat (2022:132), dimensi kebijakan ialah dimensi yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan melalui prosedur yang masuk akal yang dilihat dari data dan informasi yang dipercaya. Kebijakan ini dibuat agar masyarakat dapat mengontrol secara langsung. Paradigma kebijakan publik biasanya berubah. Ada dua paradigma yang terkenal di negara berkembang model yang berpusat pada masyarakat dan model yang berpusat pada pemerintah. Kebijakan publik terdiri dari tahapan kebijakan, analisis kebijakan, kebijakan implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Tahapan kebijakan termasuk penetapan agenda kebijakan, pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian.

Menurut Keban dalam (Winarno, 2017) Kebijakan publik ada dua jenis kebijakan: kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah kegiatan bersama-sama yang diwujudkan melalui wewenang pemerintah yang legitimasi untuk mendorong dan mengambat tindakan yang private. Kebijakan publik mempunyai dua ciri yang pertama, dirumuskan oleh pemerintah dan berdasarkan prosedur yang dibuat. Kedua, bersifat memaksa terhadap tindakan publik. Kebijakan yang bersifat privat ialah tindakan yang dilakukan oleh pihak swasta dan tidak bersifat memaksa kepada masyarakat maupun instansi. Menurut Islamy dalam (Keban, 2014) mengatakan bahwa tujuan kebijakan terdiri dari Tiga komponen terdiri dari: 1) tujuan yang ingin dicapai dan dikenali; 2) strategi untuk mencapai tujuan tersebut; dan 3) pelaksanaan yang nyata dari strategi dan taktik.

Menurut Nurdin Usman dalam (Anin et al., 2024), Implementasi bukan hanya aktivitas, itu adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi juga adalah adanya mekanisme sistem. Tujuan pengambilan keputusan dapat dicapai dengan menerapkan kebijakan publik.

Menurut Agustino dalam (Pramono, 2020) implementasi kebijakan ialah suatu proses mengubah peraturan menjadi tindakan. Karena ada berbagai kepentingan yang terlibat, implementasi kebijakan sangat politis. Pemikiran ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya adalah proses menerapkan peraturan atau

kebijakan, yang berarti menerjemahkan rencana ke dalam tindakan. Sedangkan menurut Lester dan Sreewart dalam (Agustino, 2020) implementasi kebijakan ialah suatu kegiatan yang dinamis, dalam pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai sasaran atau tujuan dari kebijakan.

Model implementasi George C. Edward III dalam (Yulianto, 2015) mengemukakan “*We ask: What are the prerequisites for successful policy implementation? at the outset of our approach to the study of policy implementation. What are the main barriers to implementing policies successfully?*” Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: “*communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*” berikut penjelasan dari keempat faktor tersebut:

- a. Komunikasi merupakan proses implementasi kebijakan yang sangat penting untuk menyelesaikan tugas. Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik jika ada komunikasi yang baik antara implementor dan tujuan kebijakan.
- b. Sumber daya didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembagian tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, dana untuk operasional kebijakan, dan fasilitas penunjang. Akibatnya, kebijakan hanyalah rencana kertas yang tidak memiliki sumber daya.
- d. Disposisi didefinisikan sebagai sifat yang dimiliki oleh pelaku kebijakan, seperti integritas, demokratis, dan komitmen Struktur birokrasi suatu kebijakan adalah komponen penting. Struktur organisasi yang terlalu panjang dapat menyebabkan pengawasan yang lemah dan alur kebijakan yang rumit dan kaku.

Sajidin & Antuli (2022) mendefinisikan *food security* atau yang biasa kita sebut ketahanan pangan merupakan suatu kondisi dimana seluruh manusia mempunyai akses dan otoritas atas jumlah pangan yang cukup dan berkualitas untuk hidup yang sehat. Tiga indikator kondisi ketahanan pangan digunakan dalam sistem ketahanan pangan: 1) ketersediaan pangan, yang mencakup kesetimbangan dan keberlangsungan pengadaan pangan; 2) penyaluran, yang mencakup situasi yang mudah diakses dan terjangkau daya beli; dan 3) penggunaan pangan, yang mencakup mutu, keamanan, dan pemenuhan gizi masyarakat. Kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan ketiga indikator ketahanan pangan agar efektif. Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 13 Tahun 2005 untuk mengatur pembangunan perberasan di seluruh negeri. Karena ketahanan pangan sangat kompleks, kementerian terkait harus melakukan hal-hal berikut untuk meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan: 1) mendorong peningkatan produksi dan produktivitas, 2) mendukung pakta untuk diversifikasi usaha dan pengembangan pasca

panen, 3) kebijaksanaan harga, 4) kebijakan ekspor dan impor beras, 5) penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin, dan 6) pengelolaan cadangan beras nasional. (Inpres RI, 2005)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk Menyelidiki Implementasi Program Ketahanan Pangan Melalui Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Pagimana), dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini ada 7 orang yang peneliti wawancara, 1 Kepala Kantor Kecamatan Pagimana, 3 Kepala Desa dan 3 masyarakat menjadi informan untuk informasi tentang kondisi dan situasi dan data sekunder sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: data anggaran ketahanan pangan yang ada di Kecamatan Pagimana, data anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di Desa Lambangan, Desa Tinting dan Desa Pisou dan Dokumentasi pemberian bantuan dan juga fasilitas fisik yang ada di Desa Lambangan, Desa Tinting dan Desa Pisou. Penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman yang mencakup pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program ketahanan pangan melalui anggaran Dana Desa (studi kasus di Kecamatan Pagimana) dapat di jabarkan sebagai berikut :

1) Komunikasi

komunikasi dalam implementasi program ketahanan pangan melalui anggaran dana desa sudah berjalan dengan baik, sudah terjalin komunikasi, pelaksana kebijakan menginformasikan kepada kelompok sasaran atau masyarakat mengenai program ketahanan pangan ini sudah dapat memahami apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan dan sosialisasi pemerintah dengan masyarakat terkait dengan program ketahanan pangan sudah berjalan namun belum bisa dikatakan dengan baik dan indikator pengarah pelaksanaan terkait dengan program ketahanan pangan sudah baik dimana pengarah dari pemerintah kecamatan ke pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik dan juga arahan dari kepala desa kepada aparatur desa dan masyarakat sudah berjalan dengan baik.

Hasil dan temuan penelitian ini selaras dengan penelitian dari Yulianti, dkk (2023) bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting hal ini berdampak besar pada pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Jika pembuat keputusan

menyadari apa yang diperlukan dalam pekerjaan mereka, implementasi kebijakan publik akan berjalan dengan baik.

2) Sumber Daya

Sumber daya sudah baik dimana kemampuan pemerintah dalam implementasi program ketahanan pangan melalui anggaran dana desa sudah cukup baik dan harus ditingkatkan terutama dalam upaya pemenuhan pangan dan gizi masyarakat, bahwa ketersediaan anggaran dalam implementasi ketahanan pangan masih sangat minim walaupun di setiap tahun di kecamatan pagimana anggaran sudah tersedia namun pemerintah masih kesulitan dalam pengadaan bantuan pangan kepada masyarakat dan ketersediaan fasilitas fisik dalam implementasi ketahanan pangan melalui anggaran dana desa sudah tersedia.

Hasil dan temuan penelitian ini selaras dengan penelitian dari Rahmi & Jumiati (2020) Kebijakan akan menjadi lebih baik dengan terpenuhnya sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas

3) Disposisi

Disposisi sudah diterapkan dengan baik dimana indikator transparansi dalam implementasi ketahanan pangan melalui anggaran dana desa pemerintah membuat spanduk APBDes agar masyarakat atau publik bisa mengetahui informasinya dan sikap dan komitmen pemerintah dalam implementasi ketahanan pangan melalui anggaran dana desa sudah baik pemerintah kecamatan maupun desa terus berusaha memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Hasil dan temuan penelitian ini selaras dengan penelitian dari Fazry (2019) disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi penerapan kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi sudah dijalankan dengan baik dimana dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi program ketahanan pangan melalui anggaran dana desa mampu berkontribusi secara signifikan pada peningkatan keberhasilan kebijakan ketahanan pangan di mana prosedur operasi standar (SOP) untuk menggunakan anggaran dalam bantuan ketahanan pangan memudahkan pemerintah kecamatan dan desa, pelaksanaan program ketahanan pangan sudah sesuai prosedur dan penerima bantuan sudah sesuai target kelompok sasaran dari program ketahanan pangan, masyarakat sudah merasakan dampak dari bantuan-bantuan yang diberikan. dan peran pemerintah dalam memanfaatkan anggaran dana desa untuk

implementasi ketahanan pangan sudah baik pemerintah kecamatan maupun desa selalu memberikan bantuan pangan dan bantuan fasilitas pertanian atau perikanan.

Hasil dan temuan penelitian ini selaras dengan penelitian dari Setiawan, dkk (2023) Struktur Birokrasi merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksanaan prosedur operasi standar (SOP) memiliki banyak manfaat, termasuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran tugas dan fungsi utama, melakukan koreksi, dan menilai hasil dari peningkatan kinerja setiap unit kerja ke tingkat yang lebih efisien, efisien, profesional, transparan, dan handal Pemanfaatan dana desa adalah salah satu dari banyak faktor yang dapat membantu penyediaan akses pangan.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program ketahanan pangan melalui anggaran dana desa (studi kasus di Kecamatan Pagimana) sudah baik penerapannya (1) Komunikasi, sudah baik dimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sosialisasi dan pengarahan sudah berjalan dengan baik, (2) Sumber Daya sudah baik dimana kemampuan pemerintah dan fasilitas fisik sudah baik dan tersedia sedangkan anggaran masih minim tetapi bantuan tetap berjalan setiap tahun, (3) Disposisi sudah baik dimana Transparansi dan komitmen pemerintah sudah berjalan dengan baik dan (4) Struktur Birokrasi sudah dijalankan dengan baik dimana SOP berkontribusi besar dalam peningkatan keberhasilan kebijakan ketahanan pangan dan peran pemerintah dalam memanfaatkan anggaran untuk kebijakan ketahanan pangan sudah baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan melalui anggaran dana desa sudah berjalan dengan efektif dan kebijakan ketahanan pangan harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan komitmen pelaksana. Dengan demikian, program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA CV.
- Anin, S., Tiza, A. L., & Fritantus, Y. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kebersihan Lingkungan Di Terminal Kefamenanu Kelurahan Kefa Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. 6, 10–18.
- Fazry, R. W. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*,

- 6(4), 358–375.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3104/pdf>
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Perberasan Presiden
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik : Konsep, teori dan isu* (Ed.3, cet). Yogyakarta: Gava Media.
- Keputusan Menteri Desa PDTT RI No 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.
- Kusuma Wardhana, T. A. N. D., Afifah, W., & Fikri, S. (2022). Peran Negara Dalam Menjamin Hak Bebas Dari Kelaparan. *Iblam Law Review*, 2(2), 98–107. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.71>
- Malawat, S. (2022). *Buku Pengantar Administrasi Publik*. In A. Pardede (Ed.), *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Sajidin, M., & Antuli, R. R. (2022). Implementasi Program Ketahanan Pangan Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Tingkat Desa di Kabupaten Bogor. *Mandar: Social Science Journal*, 1(2), 112–120. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/2187%0Ahttps://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/download/2187/1113>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Winarno, E. (2017). Kompleksitas proses kebijakan sosial. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 256–258. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2258/1107>
- Yulianti, Y., Apriyanto, M., Azhar, A., & Fikri, K. N. S. (2023). Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(1), 16–24. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i1.293>
- Yulianto, K. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.